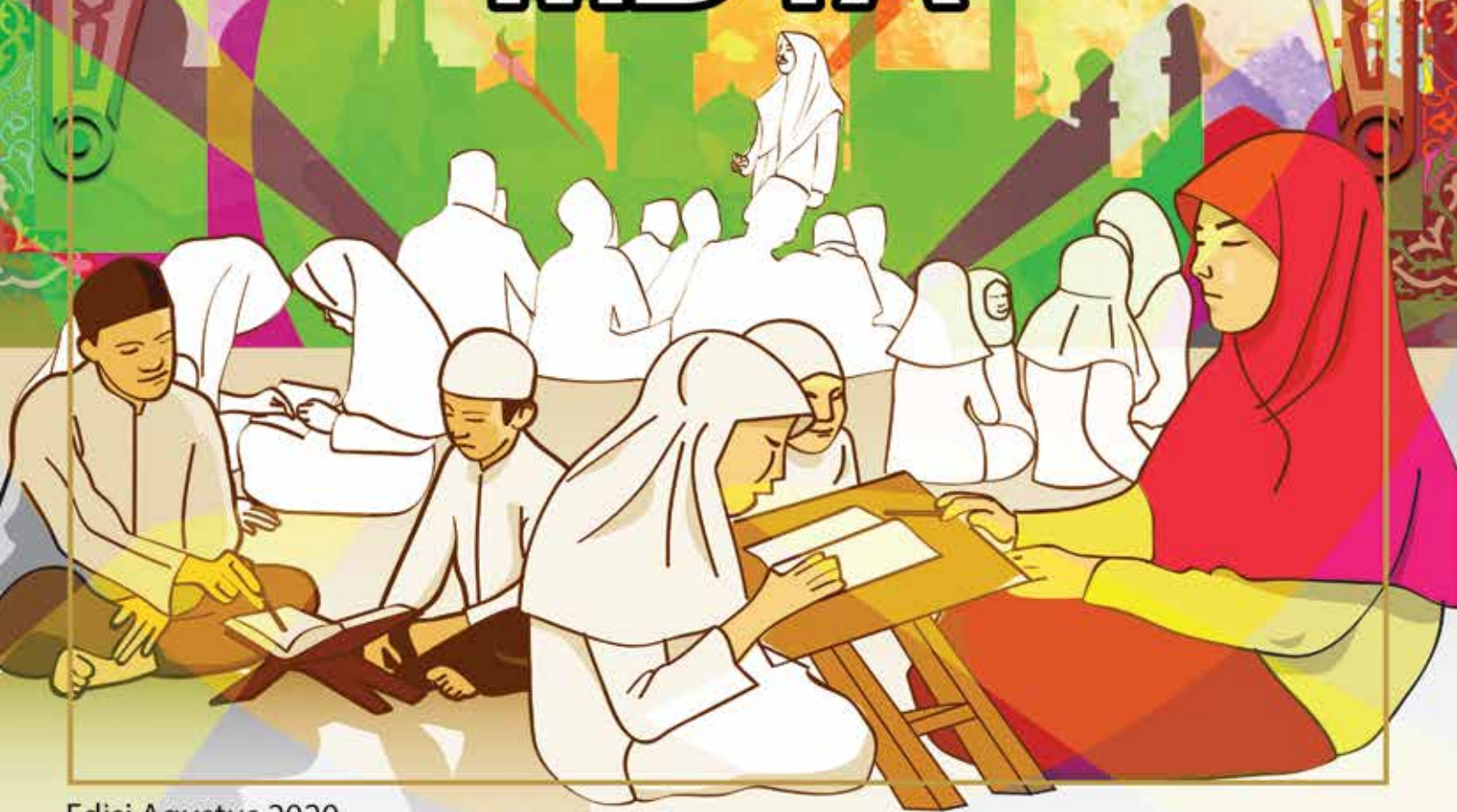




Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

Memandirikan MDTA



Agustusan Tanpa Panjat Pinang

75 Tahun
**KEMERDEKAAN
INDONESIA**

INDONESIA MAJU



Foto: motherandbaby

Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI identik dengan lomba ala rakyat. Mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga lomba makan kerupuk. Sederhana, meriah, menantang, tapi penuh kebersamaan.

Di tengah pandemi, kemeriahan itu sirna. Seolah menandakan bahwa bangsa ini belum merdeka melawan corona. Mendagri sampai mewanti-wanti: "Mau 17 Agustus, orang lomba panjat pinang entar tertular, jangan," ujar Mendagri Tito Karnavian.

Panjat pinang sebenarnya tradisi kerajaan Belanda. Dilaksanakan setiap 31 Agustus, untuk memperingati kelahiran Ratu Wilhelmina. Di Indonesia, panjat pinang dikenalkan oleh penjajah Belanda. Lomba yang dibuat untuk pribumi.

Meski awalnya dijadikan sarana hiburan bagi penjajah. Namun, karena nilai positif kebersamaan, perjuangan, dan kerjasama itulah panjat pinang kemudian menjadi tradisi peringatan hari kemerdekaan.

Untuk mencapai puncak

pinang, peserta harus bergelut dengan licinnya batang pinang. Begitulah perjuangan. Meski di masa pandemi panjat pinang secara fisik dilarang, namun kita semua tetap bisa melakukannya.

Di masa pandemi ini kita diajarkan agar memanjat pinang kebersamaan dengan menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan meningkatkan kesabaran. Bak di dalam kepompong, pinjat pinang di masa pandemi adalah menaikkan level kemampuan diri, baik kemampuan lahiriah maupun ruhaniah.

Ketika pandemi selesai. Manusia pun seperti keluar dari kepompong. Kemampuan diri manusia Indonesia sudah jauh meningkat. Sehingga hadiah berupa kemajuan bangsa ada di depan mata.

Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang mampu memanjat pinang kemuliaan menuju tangga kesuksesan. Termasuk juga Majalah Cirebon Katon, semoga mampu melewati tangga-tangga kesuksesan.

Dirgahayu Indonesia. Indonesia Maju !

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risalah)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

IA Fazri

Reporter :

Firman • Maulana • Adi • Yusuf • Mahardika

Fotografer :

Alfian

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman • Ihsan

Distribusi :

Adiw

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Nasib MDTA, Berharap Revisi Perda

10 | Menjawab Tantangan Mewujudkan Cirebon Agamis



14 | KILAS

Penerapan Aplikasi Siskeudes



18 | PUBLIKA

Paket Data untuk Siswa



20 | OPINI

Integrasi Pengelolaan Sampah Organik Dan Budidaya Lele



22 | DINAMIKA KOMISI

Penerapan Siskeudes Butuh Pelatihan SDM

24 | Pembangunan Pasar Pasalaran Tak Kunjung Usai

26 | Potensi Ternak Sapi Padusan Besar, Butuh Suntikan Modal

28 | Sidak Perusahaan, Pastikan 60% Tenaga Kerja Lokal



30 | PROFIL

H. Subhan:
Politik Itu Luhur Maka Harus Jujur



33 | INSPIRASI

Optimisme Rotan Cirebon Menguasai Pasar Dunia

36 | POTENSI

Kerajinan Ban Bekas Ramah Lingkungan, Hasil Menguntungkan

Nasib MDTA, Berharap Revisi Perda

Infrastruktur MDTA banyak yang tak layak. Kesejahteraan guru belum memadai. Visi Kabupaten Cirebon yang Agamis pun dipertanyakan.



Keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) nyaris tak terdengar. Entah karena kurang diperhatikan, atau memang banyak orang yang belum mengenalnya. Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang MDTA dianggap masih kurang menggigit. Perlukah direvisi?

Para pengelola, pengurus, dan guru MDTA merasa masih belum dianggap. Ada Perda, namun mereka menilainya belum dilaksanakan dengan baik. Masih banyak MDTA yang memprihatinkan.

Kondisinya seperti yang terjadi di MDTA Al-Furqon Blok Pande, Desa Gebang, Kecamatan Ge-

Foto: foto: dok.khann



Foto: dok.Quesoy /AI BBC

bang. MDTA dibawah naungan Yayasan Al Furqon itu hanya mempunyai 5 kelas untuk 100 murid. Itupun harus rela bergantian dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

“Kalau pagi dipakai MI, nah, siangnya baru dipakai untuk madrasah, ya karena memang masih satu yayasan juga. 5 tahun lalu pernah diperbaiki, tapi sudah lama, sekarang tembok dan jendela sudah pada rusak,” ujar Casiwan Abdullah, salah satu pengajar sejak Tahun 2005.

Kondisi serupa juga terjadi di MDTA Nurul Hidayah Blok Balong, Desa Gebang Ilir, yang hanya memiliki 6 tenaga pengajar, 60 siswa dan 4 ruangan kelas belajar. Kondisinya rusak ringan sejak 2 tahun terakhir.

“Kita sudah mengajukan perbaikan ke Pemda melalui FKDT. Namun sampai sekarang belum direalisasikan,” kata Mohammad Izzudin, Pengajar MDTA Nurul Hidayah, kepada Reporter Cirebon Katon.

Selain kondisi bangunan, permasalahan tak kalah pelik berkaitan insentif bagi para pengajar. karena sejauh ini, in-

sentif yang diberikan masih mengandalkan iuran dari para siswa tiap bulannya. “Satu bulan 10 ribu, itupun tidak semuanya membayar. Akhirnya terkadang dirapel untuk beberapa bulan,” ungkapnya.

“Sebagai Kota Wali, dibandingkan Kabupaten Indramayu justru Pemda Cirebon belum pernah ada perhatian, sementara di Kabupaten Indramayu diberikan pemberdayaan dan penghargaan kepada Guru Ngaji dan dianggap oleh Pemda,” keluh Ibrohim, salahsatu Guru Ngaji dari Kecamatan Jamblang, kepada Cirebon Katon.

Izzudin pun berharap, agar pemerintah daerah bisa memberikan perhatian yang layak bagi Madrasah Diniyah. Apalagi saat ini Pemkab Cirebon sudah memiliki Perda MDTA, yang mengatur anak usia 5-10 tahun untuk mengikuti madrasah.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah pernah mengajukan untuk MDTA pada saat Musrenbang Desa (Musrenbangdes) tahun lalu. Namun lagi-lagi PemdDes (Pemerintah Desa) tidak bisa berbuat banyak untuk per-

baikan bangunan maupun bantuan insentif pengajar. Alasannya, kata Izzudin, MDTA masih dianggap pendidikan yang non formal sehingga tidak diutamakan untuk menggunakan anggaran dana desa.

Oleh karenanya, ia juga berharap perda MDTA mampu mengatur dan menjelaskan status madrasah agar disetarakan dengan pendidikan formal lainnya seperti SD, MI dan lain sebagainya. “Kalau sudah diakui statusnya dengan diformalkan, saya pikir masalah lainnya bisa selesai. Karena secara otomatis pemerintah juga akan bertanggungjawab,” kata Izzudin.

Sekretaris Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Cirebon, Mohammad Imam juga mengamini kondisi MDTA di Kabupaten Cirebon yang masih memprihatinkan. Pasalnya, kata Imam, masih banyak madrasah yang tidak terurus dengan baik, karena keterbatasan biaya untuk pengelolaan.

“Kita lihat, guru madrasah bekerja dengan sukarela dan swadaya. Kondisi infrastruktur madrasah juga sangat tak layak, banyak bangunan yang tidak terurus, rusak dan kumuh,” kata Imam saat ditemui Cirebon Katon di kediamannya.

Imam menilai, pendidikan bagi anak usia dini sangatlah penting, terutama pendidikan agama bagi anak-anak untuk membangun karakter suatu bangsa. Sehingga, menurutnya hal itu harus dilakukan dengan perencanaan dan manajemen yang baik, supaya generasi muda dapat memiliki karakter dan akhlak yang mulia.

Selain itu, kata Imam di zaman globalisasi media ini, arus informasi sangatlah cepat. Sehingga tidak menutup kemu-



ngkinan berbagai ajaran dan doktrin mudah masuk dari berbagai ruang dan media. “Disini lah peran MDTA, untuk memperkuat generasi bangsa dengan membiasakan mengaji dan memperdalam ilmu agama bagi anak-anak melalui madrasah,” tandasnya.

Perlu Aturan Terintegrasi

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an, Taman Pendidikan Al-Qur’an Dan Ta’limul Qur’an Lil Aulad atau disebut juga Perda MDTA, merupakan perjuangan dari FKDT Kabupaten Cirebon dalam mengawal pendidikan agama bagi anak-anak usia dini. Menurut Abdul Rasyid, Ketua FKDT Kecamatan Ciwaringin hal itu diinisiasi sejak tahun 2004 yang kemudian pada tahun 2009 lahir Perda MDTA.

Setelah diterbitkannya Perda selama kurun 2005-2009, perjuangan FKDT adalah memasukkan aturan siswa SD agar wajib mengikuti MDTA. Namun setelah masuk dalam aturan,

pelaksanaannya belum maksimal, belum semua sekolah formal mewajibkan itu. Padahal kita berharap melalui aturan Perda tersebut, Perda hadir bukan dalam bentuk aturan yang dibukukan saja, namun harus ada manfaat dan realisasinya,” ungkap Abdul Rasyid.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhaimin, Ketua FKDT Jamblang, ia mengatakan bahwa ada 884 DTA di Kabupaten Cirebon, dengan jumlah siswa 84.214 dan guru 4.830. Ini belum sebanding dengan jumlah siswa yang bersekolah formal.

“Artinya masih banyak siswa yang belum mengikuti MDTA, saya pikir belum ada sinkronisasi dari Pemkab untuk berkoordinasi dengan sekolah formal,” kata Muhaimin.

Hal berbeda justru disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Dr Iffan Ahmad Gufron M Phill, ia justru menilai soal Perda MDTA yang ada sejauh ini tumpang tindih dengan aturan yang lebih ting-

gi, maupun kewenangan yang berlaku. Sehingga berpengaruh pada penerapannya yang saling berbenturan.

“Misalnya, dalam perda ada pasal yang mewajibkan belajar di MDTA selama 4 tahun, kemudian indikasinya ketika mereka masuk SMP/MTS mereka harus memiliki ijazah MDTA. Sehingga bagi mereka yang tidak mempunyai ijazah tak bisa melanjutkannya. Hal itu justru menurut saya berbenturan dengan aturan kementerian yang mewajibkan untuk belajar 9 tahun, atau peraturan presiden yang mengatur wajib belajar 12 tahun,” jelasnya.

Kedua, kata Iffan, ada problem sinergitas antara MDTA dengan TPA. Kalau kita merujuk pada Perda MDTA, prasyarat masuk MDTA harus lulus dari TPA. “Pertanyaannya adakah sinergi antara TPA dengan MDTA? Apakah sudah ada sinergitas untuk memastikan itu? Bagaimana implementasi antara pihak TPA dengan MDTA, kalau tidak ada, tentu akan kacau lagi, karena fungsi sinergitas ini untuk mengatur kurikulum yang berkelanjutan, misal TPA fokus baca Al-Quran, DTA tinggal melanjutkan,” jelasnya.

Kemudian, Iffan juga menilai perlu sinergitas antara MI (Madrasah Ibtidaiyah) dengan SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu), dalam Perda sudah mengatur bahwa ada kurikulum khusus bagi yang sekolah di MI maupun SDIT. “Sudahkah implementasi sinergi kurikulum itu dilakukan? tanyanya.

Selanjutnya, Iffan juga menilai soal kurikulum yang selama ini terjadi dikotomi keilmuan. Harus ada pengenalan ilmu integratif yang utuh tidak ada lagi pembedaan antara ilmu umum dan ilmu agama.

“Jadi saya pikir perlu kurikulum sains Islam pada MDTA, kita kaitkan sains itu dekat dengan agama. Ketika kita lihat dalam Al Qur’an itu tidak hanya menjelaskan soal ibadah, tetapi semua unsur kehidupan, misalnya pembelajaran dalam meneliti penciptaan hewan, hal itu sedang berbicara tauhid dengan cara mengamati ciptaan tuhan. Sehingga anak-anak berfikir bahwa sains itu bagian dari agama,” ungkapnya.

Perlu Revisi Perda

Selain itu, bantuan bagi MDTA juga belum secara merata terealisasi. “Diantaranya bantuan yang nilainya Rp 2.000 per bulan, atau 1 tahun Rp 24.000 per siswa. Namun itupun hanya untuk DTA yang mengajukan melalui proposal. Jika tidak mengusulkan, maka tidak akan mendapatkan bantuan. Kemudian, ada bantuan buat guru yang jumlahnya Rp 250.000 per guru per tahun, tapi tidak semua dapat. Terakhir ada bantuan sarana dan prasarana untuk madrasah senilai 5 juta pertahun,” ungkap Muhaimin.

Sejauh ini, kata Muhaimin, FKDT telah mengusulkan bantuan Rp 5.000/per siswa/bulan, atau Rp 60.000/per tahun, dan untuk guru Rp 100 ribu perbulan, serta infrastruktur sebesar 15 juta setiap Madrasah.

FKDT juga berharap mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Kabupaten Cirebon. “Harapan kami adanya *monitoring* DTA dan pelaksanaannya oleh FKDT masing-masing kecamatan. Kami meminta bantuan operasional untuk FKDT kabupaten dan kecamatan agar mempunyai kantor sekretariat sebagai wadah organisasi,” harap Sekretaris FKDT



Kabupaten Cirebon, Mohamad Imam.

Hal itu menurutnya untuk mendorong terwujudnya MDTA yang mandiri. Oleh karenanya tentu harus adanya regulasi yang mendorong kesejahteraan MDTA, guru ngaji dan seluruh elemen di dalamnya. “Dengan adanya hal itu, tentu perubahan Perda MDTA yang peduli terhadap madrasah dan guru ngaji sangatlah penting untuk segera diselesaikan,” tandasnya

Masuk Promperda 2020

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi mengungkapkan bahwa peningkatkan kualitas pendidikan agama dan membangun akhlak bangsa sebagai bentuk mewujudkan visi misi Bupati. Untuk itu perlu adanya perubahan Perda MDTA.

Visi misi bupati dalam RP-JMD dijelaskan ingin mewujudkan Cirebon yang Agamis. Sehingga perlu adanya pendidikan akhlak dan karakter bagi anak. Hal itu harus dituangkan dalam Perda supaya operasional.

“DPRD mengusulkan ada-

nya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an, Taman Pendidikan Al-Qur’an Dan Ta’limul Qur’an Lil Aulad atau disebut juga Perda MDTA dalam Propemperda 2020,” usul Luthfi.

Perda harus dapat menyelesaikan persoalan dan masalah terkait dengan bidang keagamaan. Juga adanya keberpihakan kepada guru madrasah, guru ngaji, penyuluh agama dan imam mushola.

“Kami perlu kajian terkait Perubahan Raperda MDTA agar lebih operasional dan dapat di kunci poin penting yang dapat meningkatkan kualitas keagamaan di Kabupaten Cirebon,” terangnya.

Menurutnya, harus ada alat paksa untuk mendorong dinas pendidikan agar ikutserta bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Kabupaten Cirebon. “Tidak hanya membangun pendidikan formal, namun juga menjadikan generasi kita menjadi generasi Qur’ani yang beretika,” katanya. •fal/suf

Menuju MDTA Mandiri, Bisakah?

MDTA idelanya bisa mandiri. Kedepan tidak lagi berharap dan berpangku pada bantuan pemerintah.



Foto: foto: dakiwan

Kemandirin Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah (MDTA) Kabupaten Cirebon menjadi harapan seluruh masyarakat, terutama bagi pengelola dan tenaga pengajar. Sistem yang baik membuat masyarakat akan lebih antusias menitipkan anaknya di MDTA.

Hal itu ungkapkan oleh Sekretaris Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT) Kabupaten Cirebon, Mohammad Imam. Ia mengatakan Cirebon sebagai kota wali harus menciptakan generasi muda yang agamis dan berakhlakul karimah. Salah satunya dengan pendidikan sejak dini melalui madrasah.

Namun, menurut Imam hal itu jauh panggang dari api. Kondisi

MDTA di Kabupaten Cirebon masih memprihatinkan, jauh dari kata mandiri. "Oleh karenanya, kita di FKDT tetap harus berusaha untuk mewujudkan kemandirian MDTA," ungkapnya.

Menurutnya, hal itu terjadi akibat sistem pengelolaan MDTA yang belum maksimal dan belum operasional, disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya kurang tegasnya regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, maupun Perda yang ada. "Belum ada implementasi secara konkret dilakukan," katanya.

Akademisi muda sekaligus Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Masyarakat (LPPM), Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Dr Iffan

Ahmad Gufron M Phill, justru melihat keberadaan MDTA itu sudah mandiri, karena didirikan melalui yayasan secara swadaya masyarakat.

Hanya saja, karena MDTA masih bersifat swadaya, maka tidak heran jika prasarana maupun kualitas pendidik belum sesuai standar yang diharapkan. "Tidak sedikit yang masih mengandalkan bantuan pemerintah untuk operasionalnya. Selain itu, tidak sedikit kualitas pengajarannya yang belum memenuhi prasyarat sebagai pendidik, misalnya dengan minimal strata S1," ujar Iffan.

Sehingga, menurut Iffan pemerintah harus berperan, hadir dan melihat persoalan MDTA. Perda harus tegas agar peme-



rintah mensupport keberlangsungannya. Hal itu dapat dilakukan, pertama dengan melakukan peningkatan kualitas pendidik.

Perlu pemberian program beasiswa bagi guru-guru yang belum memenuhi standar strata 1. "Tahun 2009 pernah ada program beasiswa bagi guru MDTA untuk kuliah, nah sekarang belum ada lagi, atau bisa juga dengan program pelatihan pendidik," jelasnya.

Kedua, perlunya dukungan melalui iklan layanan masyarakat terhadap pentingnya mengikuti MDTA. Sebagaimana visi misi Kabupaten Cirebon yang salah satunya menuju masyarakat yang religius. "Sejauh ini belum ada pengarahan melalui iklan masyarakat. Paling tidak pemerintah kabupaten harus mampu menganalogikan kepada masyarakat bahwa MDTA dan SD lainnya dua kaki yang utuh," jelas Doktor lulusan UGM ini.

Ketiga, kata Iffan, agar MDTA bisa mandiri secara utuh dan tidak bergantung pada bantuan

pemerintah. Maka bagaimana upaya pemerintah memberi program pelatihan *edupreuner* maupun *enterpreuner* lainnya, untuk menambah pendapatan bagi pengelola MDTA.

"Artinya, pemerintah perlu memberi program yang berbentuk kail, tidak dalam bentuk ikan, sehingga DTA memiliki aset," ujarnya. Hal ini sudah dilakukan di pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon. Mereka memiliki pendapatan sendiri dari *edupreuner* melalui koperasi, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Sehingga ketika bantuan dari pemerintah macet, MDTA tetap bisa berjalan

Terakhir, selain berkaitan soal kemandirian MDTA, Iffan juga berpendapat bahwa dalam era digital sekarang, perlu Perda yang mengatur untuk pembelajaran digital bagi MDTA. Tak perlu antipati soal era pembelajaran berbasis digital maupun daring.

"Karena eranya kedepan kita tidak akan terpisah dari teknolo-

gi, saya pikir anak-anak sudah banyak yang memiliki smart-phone, apalagi di masa pandemi seperti ini, dengan keterbatasan waktu dan pertemuan maka salah satu caranya pembelajaran tetap berjalan, ya hanya melalui digital," tandasnya.

Selain perlunya kemandirian MDTA, tak kalah penting adalah kemakmuran tenaga pengajar dan guru ngaji. Karena sejauh ini, keberadaan guru ngaji masih belum diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah, terlebih pasca ketidakjelasan keberlangsungan Gerakan Maghrib Mengaji yang dulu pernah berjalan.

Hal itu disampaikan, Karyono Penyuluh Agama di Desa Klagenan sekaligus guru ngaji. Gerakan Maghrib Mengaji sudah berjalan dari tahun 2016 melalui Peraturan Bupati (Perbup) No 47 tahun 2016, tentang Maghrib Mengaji dan kesejahteraan bagi guru ngaji.

"Namun, sekalipun sudah ada Perbup yang mengatur untuk kesejahteraan guru ngaji, aturan yang ada masih bersifat normatif belum secara spesifik," jelasnya.

Padahal, menurut Karyono proses pengusulan bantuan bagi kesejahteraan guru ngaji, sudah dilakukan secara sistematis dari tingkatan desa dengan mencantumkan *by name, by adres*. Namun, tatkala program bantuan itu keluar, banyak yang tidak tepat sasaran.

"Ada 415 lembaga mengaji yang terdata, dan ada 1.626 guru ngaji se Kabupaten Cirebon. Pemda wajib merealisasikan kesejahteraan, saat ini para pejuang guru ngaji, baru diberikan insentif dari program gubernur dengan insentif 2,4 juta per tahun," katanya. •fal/suf

Mohammad Imam, Sekretaris FKDT Kabupaten Cirebon

Menjawab Tantangan Mewujudkan Cirebon Agamis

Masalah generasi muda sekarang kompleks, mulai dari narkoba, radikalisme, hingga seks bebas. MDTA pun siap menjawab keseriusan Pemda dalam mewujudkan masyarakat yang agamis.



Penyerahan bantuan insentif bagi tenaga pengajar DTA yang diinisiasi oleh Baznas Kabupaten Cirebon bersama FKDT Kabupaten Cirebon

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon kini sedang menggodok Perda Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan sudah masuk dalam Promperda tahun 2020. Ten-

tu saja, tujuan agar fungsi MDTA optimal.

Sebelumnya, sudah ada Perda MDTA Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009. Namun, Perda ini masih belum memberi optimal menjawab dinamika

MDTA. Untuk mengetahui masalah TKK, TPA, TPQ maupun MDTA lebih jauh, Redaksi Cirebon Katon mewawancarai Sekretaris Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Cirebon, Mohammad Imam.

Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana pendapat FKDT terkait kondisi MDTA, Guru Madrasah, Penyuluh Agama dan Imam Mushola yang ada di Kabupaten Cirebon?

Kalau kita lihat keberadaan MDTA di Kabupaten Cirebon kondisi infrastruktur dan kesejahteraan Guru Madrasah kita sangat memprihatinkan. Belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon. Fasilitas Madrasah kita masih minim dan belum memadai.

Hal itu, karena kurangnya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak khususnya Pemda. Berbeda dengan Kabupaten Indramayu misalnya, kita pernah berkunjung kesana Pemda sudah mulai melirik keberadaan madrasah.

Kemudian soal kondisi kesejahteraan tenaga pengajarnya, kami FKDT Kabupaten Cirebon sudah berkeliling ke setiap kecamatan, banyak guru madrasah yang bekerja dengan sukarela tanpa dibayar. Tentu jauh, kalau dibandingkan dengan guru formal yang mendapatkan support atau minimal mendapatkan intensif honorer tiap bulannya, nah kalau Guru ngaji itu tidak menentu.

Belum lagi para murid madrasah yang tidak mendapat Bos (Bantuan Operasional Sekolah) berbeda dengan murid yang bersekolah MI dan MTs. Karena kalau kita lihat, dengan iuran 10 ribu perbulan saja, masih banyak para murid yang tidak sanggup membayar. Sehingga tidak aneh kalau ada beberapa MDTA di Kabupaten Cirebon yang kondisinya seakan mati tapi hidup.

La yakhya wa la yamut, lah



Sekretaris FKDT Kabupaten Cirebon, Mohammad Imam, saat menghadiri kegiatan Imtihan di salah satu MDTA di Kabupaten Cirebon.

wong laka sing mbayar, guru juga rasional, akhirnya mengajar di MDTA tidak diprioritaskan, ketika memang ada pekerjaan lain. Begitupun dengan kondisi para guru ngaji, imam mushola yang tak jauh berbeda. Mereka melakukannya dengan ikhlas beramal.

Berbeda kalau kondisi Penyuluh Agama, karena ada 2 jenis yang PNS dan honorer. Kalau mereka masih aman, karena ada insentif bulanan yang pasti, walau berbeda nominalnya. Keduanya memiliki tugas dan fungsi yang sama sesuai Peraturan Dirjen Bimas yaitu bekerja mengayomi masyarakat, mengajar dan memberikan peran keagamaan kepada majelis yang sudah terdaftar. Tidak sedikit pula para penyuluh merangkap sebagai tokoh agama.

Apa akar masalah dari persoalan yang dihadapi MDTA itu?

Sejauh ini permasalahannya sama, mereka belum mendapatkan kesejahteraan dan memiliki bangunan fasilitas yang layak.

Kita di FKDT Kabupaten Cirebon berharap ada kepedulian Pemerintah terhadap lembaga yang membentuk akhlak dan karakter generasi muda di Kabupaten Cirebon itu.

Apa dampak setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang MDTA?

Saya pikir Perda tersebut belum relevan dan tegas, masih banyak yang harus direvisi. Poinnya, apabila ingin lanjut ke jenjang SMP sederajat, DPRD dan bupati harus mendorong Dinas Pendidikan, Kabid SMP untuk memberikan rekomendasi dan aturan yang jelas terkait syarat melampirkan Ijazah DTA. Jika ingin masuk SMP/MTS calon siswa harus memiliki Ijazah MDTA dan mendapat ilmu dasar-dasar agama dengan dibuktikan telah mengikuti MDTA sebelumnya.

Hal itu karena saat ini, minat anak berkurang untuk mau ngaji di mushola, langgar maupun surau, maka jika tidak belajar di MDTA mereka tidak akan



Mohammad Imam, saat memimpin pertemuan FKDT Kabupaten Cirebon.

belajar mengaji, berbeda dengan generasi zaman dulu yang antusiasnya masih tinggi.

Apalagi kalau orangtuanya juga tidak mendorong anaknya untuk ngaji. Maka kita berharap harus ada penguatan dari Perda untuk mendorong pemerintah peduli terhadap MDTA. Saat ini efek Perda hanya pada insentif setiap tahun, itupun jumlahnya tidak terlalu besar, bantuan intensif untuk guru DTA di Kabupaten Cirebon tahun lalu hanya diberikan untuk 200 orang penerima saja. Jadi sekali lagi, penegasan aturan kuncinya terlebih dahulu.

Bagaimana peran dan solusi FKDT untuk menyelesaikan masalah MDTA?

Sejauh ini, kami FKDT telah bekerjasama dengan Baznas Kabupaten Cirebon untuk memberikan bantuan kepada 1.000 guru DTA se-Kabupaten Cirebon dan sudah dilaksanakan bersama bupati bulan Juli lalu. Tapi itu pun sifatnya akomodasi swadaya. Dana tersebut berasal dari infaq para Aparat Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon

dengan nominal 250 juta, tapi saya pikir itu jangka pendek dan tidak mungkin terus-menerus akan dilakukan.

Oleh karenanya kami memberikan tawaran rekomendasi kepada Kabag Kesra Pemda, Bupati Cirebon, Ketua DPRD, maupun Komisi IV untuk segera melakukan revisi regulasi Perda agar lebih operasional. Apalagi visi misi bupati salah satunya adalah agamis dan religius. Setelah ada revisi, kami akan mendorong Pemda menyelesaikan tugas dan kewenangannya untuk peduli terhadap MDTA. Karena sebelumnya Perda MDTA mandul dan tidak konkret.

Kami berharap Ketua DPRD dan bupati segera menerbitkan perubahan Perda. Kami FKDT Kabupaten Cirebon malu ketika hadir dalam kegiatan tingkat Propinsi. Kita dikenal Kota Wali, namun masalah keagamaan kita masih kalah dengan kota lainnya yang tidak menyangkut itu. Di Kabupaten/Kota lain bahkan FKDT nya, difasilitasi sekretariat agar maksimal dalam mengawal MDTA, lagi-lagi karena Per-

da-nya tegas. Sehingga peran hukum yang tidak mandul akan berdampak bagi kesejahteraan MDTA dan benar-benar terealisasi.

Lalu, apakah sudah diupayakan untuk revisi tersebut?

Kami sudah melakukan dialog Interaktif dengan Ketua DPRD di Pringsewu awal tahun lalu terkait dengan revisi Perda MDTA. Kemudian kami juga melakukan audiensi dengan Bupati mengenai keresahan masyarakat dan guru MDTA. Kami berharap pasca pandemi Covid-19 ini, Perda itu bisa secepatnya direvisi dengan memasukkan rekomendasi aturan dari kami.

Seperti apa kelebihan belajar di MDTA?

Jika Perda ini dilakukan perubahan, dan bisa berpihak pada guru madrasah hal itu akan memberikan energi dan semangat untuk kami terus meningkatkan kualitas pengajaran di madrasah.

Ketika Guru mendapatkan kesejahteraan, maka murid juga akan maksimal mendapatkan pengajaran agama. Kita tahu bahwa persoalan hari ini bagi anak-anak sangat kompleks dari; radikalisme, kejahatan, kenakalan remaja, pergaulan bebas. Itu semua merupakan permasalahan yang ada pada diri remaja, maka sudah seyogyanya peran Pemda untuk mitigasi itu, salah satunya dengan memberikan porsi lebih kepada MDTA. Mendidik generasi muda dengan ajaran agama yang baik, tentu harus didorong dengan kesejahteraan MDTA melalui Perda. Itupun kalau Pemda serius dalam mewujudkan visi misinya. •Suf/Fal

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Penerapan Aplikasi Siskeudes

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon ke Kecamatan Gunungjati mengenai peran Kecamatan terhadap penerapan Aplikasi Siskeudes, dalam mendukung perencanaan pembangunan yang ada di desa.



Foto-foto : dok sethwan

Pengawasan Pengelolaan PAD

Kegiatan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, dalam rangka koordinasi dan pengawasan terkait dengan Pengelolaan PAD dari Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB), di Kecamatan Astanajapura.



Foto-foto : dok sethwan

Pengawasan Galian C

Kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon di Desa Kedongdong Kidul, Kecamatan Dukupuntang, dalam rangka pengawasan pengelolaan galian C di Desa Kedongdong Kidul. Seperti diketahui, terdapat aktifitas pertambangan galian C di Gunung Petot yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Balerante Palimanan.



Foto-foto : dok sethwan

Pantau Pelaksanaan PPDB

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon saat melakukan kunjungan ke SMPN 1 Kedawung, dalam rangka mengetahui pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2020, hadir pula Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.



Foto-foto : dok sethwan

Paket Data untuk Siswa



Foto: iina/stockphoto

Tanya:

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.
Bapak ibu anggota dewan yang terhormat,
Kita sama-sama tahu bahwa masa pandemi masih berlangsung, karenanya banyak aktivitas yang terganggu. Seperti misalnya aktivitas belajar yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Pada dasarnya, kami sebagai orang tua berterima kasih karena anak-anak kami dapat terhindar dari resiko paparan Covid 19.
Namun demikian, ternyata lambat laun pembelaja-

ran daring membuat pengeluaran kami sebagai orang tua bertambah. Apalagi kegiatan ekonomi kami juga banyak yang terganggu. Hal mendasar yang membuat kami kewalahan adalah kuota internet. Bayangkan, saya punya tiga anak sekolah yang membutuhkan akses internet untuk belajar.

Dengan persoalan tersebut, apakah ada upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau dinas terkait? Misalnya memberikan subsidi kuota untuk siswa. Pada dasarnya, kami orang tua mendukung apapun program pemerintah dalam memutus persebaran Covid 19. Namun Kembali pada kemampuan kami yang terbatas, sehingga penting untuk diutarakan.

Terima kasih tim redaksi Cirebon Katon atas kesempatan menyampaikan keluhan ini. Semoga dapat ditindak lanjuti.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Maman (40) - Wiraswata - Plered.

Jawab:

Terimakasih Maman atas suratnya. Pemerintah pusat, melalui Kemendikbud, akan memprogramkan memberikan kemudahan akses internet. Rencananya pembagian paket data akan dimulai pada bulan September.

Rawan Maling



Foto: gfr/dia

Tanya :

Salam Hormat,
Semoga bapak ibu pemangku kebijakan dan wakil rakyat senantiasa sehat.

Saya Basir warga Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kab. Cirebon. Baru-baru ini rumah saya kemalingan. TV dan helm raib di gondol maling. Ternyata di malam yang sama, beberapa tetangga juga kemalingan. Peristiwa kemalingan pun terjadi pada beberapa minggu sebelumnya.

Ketika saya menceritakan peristiwa tersebut kepada rekan kerja, ternyata daerahnya juga sedang rawan pencurian. Bahkan saya mendapat info tentang kehilangan motor dan lain-lain. Keadaan ini tentu membuat masyarakat resah. Namun tidak banyak tindakan yang dilakukan, seolah pasrah.

Oleh karena itu, saya berharap ada solusi yang diberikan oleh kepala daerah, kepolisian, atau dinas terkait. Misalnya meminta kepada pemerintahan desa melalui RT dan RW untuk melaksanakan giat Kamtibmas. Memaksimalkan kinerja hansip dan aparat lainnya. Sebab jika menunggu kesadaran dari masyarakat rasa-rasanya sudah jarang yang peduli.

Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan, semoga di tindak lanjuti. Terima kasih.

Basir (45) - Wiraswata - Gempol.

Jawab:

Terimakasih Basir atas informasinya. Keluhan Anda segera kami informasikan ke instansi terkait.

Sekretariat Keluarga Pelajar dan Mahasiswa



Foto: kpo/twitter

Tanya :

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sebelumnya perkenalkan saya Abdul, mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Saya putra daerah asli Cirebon.

Menjadi pelajar di luar daerah membuat saya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Namun demikian, kecintaan terhadap kota kelahiran tetap saya pertahankan. Kecintaan tersebut diwujudkan dengan aktif dalam persatuan keluarga pelajar dan mahasiswa asal Cirebon.

Tentu bukan sekedar berkumpul tanpa makna. Kami menyelenggarakan diskusi, termasuk bagaimana mengenalkan budaya dan nilai-nilai yang berasal dari Cirebon. Namun sayangnya tidak ada tempat yang dapat digunakan sebagai sekretariat. Padahal itu penting. Selain sebagai legalitas organisasi juga bisa menjadi tempat transit bagi pelajar Cirebon yang baru pertama kali datang ke Yogyakarta.

Padahal, daerah lain termasuk kabupaten tetangga telah secara legal menyediakan sekretariat. Mereka lebih rapih dan tertata secara manajemen organisasi dan fasilitas. Oleh karena itu, saya bermaksud mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon agar bisa memfasilitasi sekretariat ikatan keluarga pelajar dan mahasiswa Kabupaten Cirebon yang ada di beberapa kota besar di Indonesia.

Demikian, semoga bisa dipertimbangkan dan menjadi kebaikan untuk semua. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Abdul (21) - Mahasiswa - Sumber.

Jawab:

Terimakasih Abdul atas informasi dan masukannya, akan kami teruskan ke dinas terkait.

Integrasi Pengelolaan Sampah Organik Dan Budidaya Lele

Oleh : Dangi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon

Hampir disetiap daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah, terutama sampah organik.

Sampah organik bisa berasal dari rumah tangga, rumah makan, pasar, hotel, rumah sakit, dan perkantoran. Sifatnya yang mudah membusuk. Kehadirannya menimbulkan bau tidak sedap.

Mekanisme reaksi aerob dan anaerob memunculkan gas metan dan amoniak. Karena berbau, itulah keberadaannya sering tidak dikehendaki. Publik menganggap material ini tidak bernilai. Jumlahnya semakin bertambah seiring dengan diversifikasi usaha warga, terlebih tanpa ada pengelolaan yang baik. Akibatnya, lingkungan menjadi bau, tampak kumuh, dan sarang penyakit.

Padahal sampah organik bukan sebagai material buangan, tetapi bisa sebagai sumber ekonomi. Sampah organik dapat dijadikan bahan baku pakan ikan lele.

Mekanisme Pengelolaan Sampah Organik

Pemahaman persampahan menjadi pintu awal pengelolaan sampah. Keterbukaan pemahaman akan memudahkan proses pemilahan dan pengumpulan. Tentu ini membutuhkan upaya penyadaran warga. Tidak serta merta, warga akan memahami persampahan. Hal ini berhubungan langsung dengan tingkat

pendidikan, kebiasaan dan perilaku. Oleh karena itu, pendampingan dan pembimbingan perlu dilakukan.

Secara sederhana, pengelolaan sampah organik sangat mudah. Kuncinya berawal dari sumber sampah organik yang sudah harus dipilah. Kenapa harus dipilah dari sumbernya? Fase ini menjadi titik awal pengelolaan. Dengan posisi sampah terpilah, pengelolaan lanjutan akan semakin mudah.

Fase pemilahan juga menjadi bagian yang membutuhkan tenaga banyak dan biaya besar. Pemerintah harus menyadari keterbatasan sumber daya baik tenaga maupun dana. Kecuali jika pemerintah mempunyai anggaran berlebih yang bisa diplot untuk fase pemilahan di TPAS.

Tidak berhenti hanya di pemilahan, fase selanjutnya adalah pengangkutan. Tahap ini membutuhkan armada khusus. Sebenarnya tidak harus mahal. Pada skala RT, wadahnya cukup drum plastik ukuran 200 liter berpenutup. Kenapa harus tertutup? Jawabnya sederhana: agar tidak berceceran dan tidak menebar bau.

Sampah organik yang diangkut dalam drum, ketika tiba di lokasi pengolahan tidak perlu ditumpahkan ke lantai penampungan. Biarkan sampah organik berada di dalam drum. Sampai sampah tersebut siap untuk digiling atau dicacah. Hasil cacahan sampah dalam bentuk pasta dita-

pada umumnya.

Pemanfaatan Sampah Organik

Sampah organik hasil pencacahan digunakan untuk bahan baku utama pakan lele. Kok bisa? Tentu bisa. Bagaimana caranya?



Foto: foto: Alifan/K

mpung dalam bak dan dimasukkan dalam drum berpenutup.

Jika ini dilakukan secara tertib dan baik, warga tidak akan komplain bau dan kumuh. Semuanya tampak rapih dan tidak tercium bau layaknya di TPS dan TPA

sampah organik yang telah dicacah secara halus, menyerupai pasta. Jika setiap rumah tangga menghasilkan sampah organik sebanyak 0,5 kg/hari, maka ada 6 rumah yang sampah organiknya bisa dimanfaatkan. Artinya tidak perlu lagi membuang sampah organik ke TPS atau TPA.

Jika setiap RT membudidayakan 10 unit terpal, pakan yang dibutuhkan sebanyak 30 kg/hari. Artinya sebanyak 60 rumah tangga, sampahnya tidak lagi dibuang ke TPS dan TPA. Sudah habis di level RT.

Lantas, bagaimana kalau bersifat massal tingkat desa atau kelurahan? Tentu dampaknya akan luar biasa bagi pengelolaan sampah organik. Dari uraian tersebut, keberadaan sampah organik membuka peluang wirasaha. Disisi lain, kecukupan protein hewani lokal bisa diakses dengan mudah dengan harga terjangkau.

Bagaimana mungkin budidaya lele berpakan sampah organik menguntungkan? Biaya pakan mencapai 70% dari keseluruhan usaha budidaya. Jika budidaya lele menggunakan pakan pellet pabrikan sudah dipastikan akan membutuhkan biaya besar. Pakan pellet pabrikan berharga kisaran Rp 12.000/kg. Sementara, pakan racikan sampah organik hanya menelan biaya Rp 4.000-5.000/kg.

Kendala yang dihadapi

Kendala yang dihadapi adalah pertama, gengsi sosial. Menjadi pengelola sampah organik bersinggungan dengan gengsi dan status sosial. Persepsi publik akan 'mencemooh' seakan akan pengelola sampah tidak bergengsi. Padahal pengelola sampah adalah laskar mandiri atau pahlawan lingkungan dengan

imbalan jasa dan pendapatan yang cukup memadai.

Kedua, komitmen pengambil kebijakan. Komitmen pemerintah dalam mendesain pengelolaan sampah tampak gamang. Terbukti, pola pengelolaan sampah setengah setengah. Hampir semuanya tidak tuntas bahkan berakhir mangkrak.

Ketiga, kesadaran warga masih membutuhkan pendampingan yang ulet agar mampu merubah perilaku. Tentu tidak mudah bagaikan membalikkan telapak tangan. Kesadaran ini membentuk perilaku keseharian yakni perilaku membuang sampah pada tempatnya, perilaku memilah sampah, dan perilaku membayar retribusi.

Strategi pengembangan

Tidak ada hal yang tidak mungkin, syaratnya *nawaitu* yang lurus dan jelas. Mengingat bahwa sampah bersifat lintas disiplin ilmu, multi dimensi, pola komunikasi antar-pemangku kepentingan (stakeholders) perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

Agendanya jelas dalam membicarakan problematika dan dinamika persampahan. Tidak sekedar adu teori yang terkesan menonjolkan kepintaran. Tidak sekedar wacana yang melangit, tetapi bahasanya harus bumi, nyata dan bisa direalisasikan.

Perubahan regulasi yang memberikan 'kenyamanan' kepada warga, penggunaan teknologi menjadi keniscayaan untuk dilakukan. Tentu, gerak ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri dan terpisah. Setidaknya ada *dirigen* yang memandu dan mengarahkan langkah pengelolaan sampah dengan strategi kreatif dan terobosan (*bussines as unusual*).

Penerapan Siskeudes Butuh Pelatihan SDM

Terobosan pembuatan aplikasi Siskeudes dinilai mampu mendongkrak sistem perencanaan dan pelaporan keuangan desa. Namun, belum diimbangi dengan kapasitas SDM yang memadai.



Foto: foto: dok. sethnan

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon memiliki perhatian yang serius dalam memperbaiki pengelolaan keuangan desa. Ini dilakukan agar pembangunan di desa efektif, dan meminimalisasi kebocoran.

Awal Juli 2007, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon pun melihat penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), salah satunya di wilayah Kecamatan Suranenggala. Dalam kunjungan tersebut diketahui dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Suranenggala semuanya sudah menginput anggaran pada Aplikasi Siskeudes. Ada satu desa yang masih ditemukan selisih anggaran, dan hanya ada dua desa yang ada penyertaan modal untuk Bumdes.

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pe-

merintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Aplikasi ini merupakan program Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Camat Suranenggala Indra Fitriani mengatakan bahwa pelaksanaan aplikasi Siskeudes belum maksimal. "Harapannya ada pelatihan bagi staff kecamatan, sehingga bisa secara langsung melayani desa-desa yang ada di wilayahnya tanpa harus ke DPMD," jelasnya.

Komisi I DPRD Kab. Cirebon berharap kepada Pemerintah Daerah Kab. Cirebon dalam hal ini DPMD agar ada pelatihan berkaitan dengan aplikasi Siskeudes bagi salah satu staff Kecamatan, sehingga fungsi fasilitasi Kecamatan pada Desa bisa terlaksa-

na dengan baik.

Untuk lebih mengetahui dan dijadikan bahan komparasi mengenai penerapan aplikasi Siskeudes, Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bekasi pada akhir Juli 2020.

Dalam kunjungannya diperoleh informasi bahwa penerapan Siskeudes di Kabupaten Bekasi sudah sejak 2018, Aplikasi yang digunakan versi 2.2, dengan database online. Juga bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik, untuk penerapan bank data digital.

Di Kabupaten Bekasi, DPMD dan Bank BJB bekerja sama dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa secara non-tunai. Semua pembelanjaan kegiatan yang ada dilakukan dengan cara transfer. Sehingga tidak ada lagi penarikan anggaran secara keseluruhan.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Bekasi dalam penerapan aplikasi Siskeudes juga kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis dari pemerintah pusat kepada admin yang berada di kabupaten.

Kelemahan sistem aplikasi online ada pada saat daftar input kegiatan. Ketika ada salah satu program yang merupakan muatan lokal di desa hal ini belum ada pada kegiatan yang ada di aplikasi Siskeudes.

Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan dengan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bekasi ini, dapat memberikan manfaat demi kemajuan bagi masing-masing daerah. Terutama dalam penerapan aplikasi online dalam mendukung perencanaan pembangunan didesa.

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon sangat mengapresiasi

dengan adanya penerapan aplikasi Siskeudes ini, namun dengan SDM yang belum mumpuni ini menjadi salah satu masalah tersendiri. Untuk itu diharapkan adanya alokasi dana untuk pelatihan. Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan pelatihan tambahan untuk pegawai-pegawai. Menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan didesa.

"Kami mengapresiasi terobosan dari pemerintah pusat yang telah membuat aplikasi Siskeudes demi meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun demikian, agar lebih efektif perlu dibarengi dengan pelatihan cara menggunakannya," jelas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Abdul Rohman.



Potensi Ternak Sapi Padusan Besar, Butuh Suntikan Modal

Sapi hasil ternak KTTS Padusan berani bersaing, baik dari segi kualitas daging maupun bobot. Berbagai pengembangan terus dilakukan, termasuk integrasi dengan pertanian.



Foto: foto: dok setwan

Menjelang persiapan peringatan Hari Raya Idul Adha Tahun 2020, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, bersama seluruh anggota menyambangi kelompok tani ternak sapi (KTTS) Padusan, yang berada di Desa Kubang, Kecamatan Talun.

Sejak berdiri Tahun 2003, dengan bibit awal 25 sapi betina, yang dirawat oleh 8 orang peternak, kini KTTS Padusan sudah melangkah maju. "Saat itu masih terbagi di rumah-rumah pribadi warga, belum dalam satu tempat seperti saat ini," kata Jahari, Ketua KTTS Padusan, saat Komisi II berkunjung.

Menurutnya, selain 25 ekor sapi sebagai bibit awal, sebelumnya sebagian warga juga sudah memiliki sapi yang dikembangkan. "Barulah tahun 2009 ada bantuan gubernur sebanyak 40 ekor sapi. Hingga tahun ini, kita telah memiliki sekitar 300 lebih ekor sapi hasil beternak selama beberapa tahun, namun perbandingan jumlah sapi betina jauh lebih sedikit, daripada jumlah sapi jantan," jelasnya.

Sehingga, kata Jahari, saat ini KTTS Padusan justru sangat membutuhkan penambahan populasi suplai jenis sapi betina, agar cepat proses perkembangbiakannya. Sementara itu, Sekretaris KTTS Padusan, Adi Mukadi mengeluhkan inseminasi buatan (IB) yang digunakan dalam proses penggemukan peternakan di KTTS Padusan. Pasalnya, hal itu tidak lebih menguntungkan daripada budidaya.

Akibatnya, KTTS Padusan tidak mau menjual hasil peternakannya ke RPH (Rumah Potong Hewan). "Harga beli saja sudah tinggi, ditambah biaya perawatan dan penggemukan, jika dijual di RPH, tentu akan rugi besar, akhirnya kita hanya melayani pembelian oleh masyarakat," keluh Adi.

Kemudian, kata Adi, berkaitan modal, sejauh ini KTTS Padusan ditopang oleh BRI dengan pengajuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) tertinggi hingga Rp 4 miliar. Namun persoalannya banyak petani ternak yang tidak memiliki agunan, sehingga para petani lebih menyukai menggunakan investor pribadi

dengan sistem pembagian 40-60 persen.

Ia juga berharap, berkaitan program bantuan peternakan agar pemerintah lebih memperhatikan tingkat hulu. Pasalnya seringkali program pemerintah terpotong di tengah jalan atau tidak sinkron dengan permintaan bantuan dari petani maupun peternak.

Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mad Saleh bersama anggotanya berjanji akan mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon agar kelompok ternak yang berpotensi seperti, KTTS Padusan, untuk bisa disupport dan dijadikan kelompok ternak percontohan di Kabupaten Cirebon.

"Kami komisi II akan melakukan koordinasi dengan BUMD yaitu BPR (Bank Perkreditan Rakyat) untuk memberi stimulan pinjaman. Kami juga akan mengusulkan untuk dilakukan *breeding* tidak hanya inseminasi. Begitu pula untuk peningkatan jalan akses masuk juga harus ditingkatkan, mengingat KTTS Padusan memiliki potensi besar," ujar Mad Saleh.

Sejauh ini, KTTS Padusan terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Karenanya, tidak sedikit yang ingin bergabung pada kelompok ternak tersebut. Sementara ini, kata Jahari, Pemerintah Desa Kubang juga sudah menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk rencana perluasan kandang.

Sejauh ini, yang menjadi pesaing adalah sapi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang harganya lebih rendah. Namun ia meyakini bahwa kualitas dan jumlah daging, sapi dari KTTS Padusan dijamin lebih bagus dan lebih banyak dari sapi Jawa.

Sekalipun pandemi *covid-19*,



pemasaran sapi padusan tetap baik. "Penjualan untuk Idul Adha tidak berpengaruh, karena masyarakat mengetahui bahwa sapi dari KTTS Padusan sehat. Dari stok yang disediakan sebanyak 230 ekor sapi, sekarang saja hanya tersisa 3 ekor," jelasnya. Adapun retribusi per penjualan sebesar Rp 100 ribu diantaranya untuk ganti pakan.

Sementara itu, Kabid Peternakan Dinas Pertanian, Drh Encus mengatakan sapi di KTTS Padusan pada momen Hari Raya Idul Adha ini akan tetap terjaga nilai jualnya. Pasalnya sapi KTTS Padusan merupakan sapi unggul dan sehat. Encus mengapresiasi

langkah para pengurus KTTS Padusan yang konsisten dalam mengelola peternakan yang unggul dan berdaya saing.

KTTS Padusan juga melakukan kegiatan yang terintegrasi satu sama lain. Limbah pertanian seperti dedaunan dan batang jagung untuk peternakan. Kemudian, pengolahan limbah ternak sebagai penyubur pertanian. Namun, sejauh ini KTTS Padusan masih terkendala dengan mesin penghancur yang belum memadai. "Kami sangat membutuhkan mesin *chopper* untuk menghancurkan limbah batang jagung dan limbah yang cukup keras," pungkas Adi. •fir/suf

Warga Sekitar PT Indofood Keluhkan Sumur Kering

Semenjak PT Indofood CBP Tbk beroperasi pada 2018, warga Desa Ender, Kecamatan Pangenan, mengaku air sumur mereka kekeringan. Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon pun mengunjungi lokasi.



Foto-foto : dak setawan

Pertengahan Maret 2020, Warga Desa Ender, Kecamatan Pangenan, berkumpul mendatangi kantor kuwu. Mereka ingin mengadu air sumur mereka sering kering. Warga menduga kekeringan itu akibat adanya sumur bor milik PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang berada di Kecamatan Pangenan.

Menindaklanjuti itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto SH menginspeksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Hadir dalam kunjungan itu juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), dan Camat Pangenan.

Sementara itu, pihak PT Indofood CBP yang diwakili oleh HRD perusahaan mengklaim, telah memiliki 3 izin sumur untuk pengambilan air bawah

tanah. Saat ini yang aktif hanya 1 sumur dan telah memiliki Surat Izin Pengambilan Air (SIPA). Setiap hari perusahaan menggunakan air dengan kebutuhan ± 90 meter kubik per hari.

Menurutnya, pada Tahun 2016, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Cirebon baru memulai operasional, sedangkan izin air sumur belum turun. Pihaknya mengetahui isu air sumur warga menjadi kering itu ketika PT Indofood mulai beroperasi pada tahun 2018.

Lanjutnya, ketika izin sumur turun, barulah PT Indofood beroperasi. Hingga pada bulan juni tahun 2019, situasi alam sedang tidak membaik, akibatnya berdampak pada air sumur yang kering, "Akhirnya kami mengundang pihak UPTD ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provin-

si Jawa Barat untuk melakukan pengecekan pada permukaan air. Namun setelah dicek, permukaan air masih sama seperti izin awal, tidak berkurang," jelasnya.

PT Indofood jugamengaku telah melakukan kesepakatan dengan warga sekitar terkait permasalahan air. "Kami memberikan solusi kepada warga dengan cara memberi suplai air, membantu membuatkan sumur untuk warga dalam penanganan kekeringan air. Dalam forum juga disepakati sumur PT Indofood boleh beroperasi ketika musim penghujan," ujarnya.

"Pada bulan maret, masih ada keluhan dari warga dan kami kembali berkomunikasi dengan warga hanya akan menggunakan sumur satu titik untuk perusahaan," tambahnya. Ia juga bilang, PT Indofood pada saat itu sebagai pembeli air bukan mengambil air dari sumur. Kekeringan yang terjadi setelah pengecekan disebabkan tidak lain oleh pembuatan sumur warga yang tidak tepat lokasinya.

Selain itu, terkait izin air sumur, kata HRD PT Indofood, pihaknya juga telah melakukan pendaftaran satu atap. "Kami mendapat kajian teknis dari Badan Biologi untuk pengambilan air sumur," ungkapnya.

Sementara itu, Camat Pangenan Bambang Setiadi, telah melakukan pengecekan di 24 titik sumur setelah mendapatkan laporan dari warga sekitar. Hasilnya pun bervariasi, "Ada yang disebabkan mesinnya rusak, ada juga kapasitas mesin penyedot air tidak sanggup dikarenakan jumlah volume air yang tidak sesuai dengan kapasitas mesin penyedot air," ujar Bambang.

Bambang menduga, permasalahan kekeringan air, bisa jadi dikarenakan kesalahan teknis.

Karena idealnya, teori pengambilan air tanah bagi masyarakat pada kedalaman 0-50 meter, dan untuk industri pada kedalaman 100-150 meter. Sedangkan di Kecamatan Pangenan teori tersebut tidak berlaku, warga juga ada yang mengambil di kedalaman 100-150 meter. Karena memang, air di kedalaman 100 meter lebih bagus dan tidak asin.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Mulus Trisla Ageng SE mengatakan akan mengusulkan untuk memanggil ESDM Provinsi, guna melakukan pengecualian perdalaman izin air sumur. "Kita akan rapatkan di intern, agar hal ini tidak berbenturan," katanya.

Senada juga disampaikan

Muklisin Nalahudin SH MH, anggota komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, menurutnya Komisi III akan memohon ke ESDM untuk mengubah perizinan rekomendasi yang ada pada aturan Perda/Perbup, nanti aturan tersebut akan dilihat berdasarkan letak geografis kewilayahan.

Selain persoalan air sumur, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon juga melakukan monitoring pengelolaan limbah dan lingkungan. PT Indofood telah memiliki izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dengan nomor 660.1/727/TL tanggal 31 Desember 2015. Serta telah memiliki izin TPS limbah B3 No.503/012.34/DPMPSTP tanggal 4 Desember 2017. •suf



Sidak Perusahaan, Pastikan 60% Tenaga Kerja Lokal

Peraturan Daerah Ketenagakerjaan mengharuskan perusahaan menyerap minimal 60 persen tenaga kerja lokal. Bagaimanakah penerapan Perda ini? Sudahkah perusahaan mentaatinya?



Foto-foto: Adh Setiawan

Dalam rangka pengawasan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi PT Cipta Sinergi Asia (CSA). Perusahaan elektronik yang memproduksi lampu LED ini berada di Kecamatan Plumbon.

“Kabupaten Cirebon sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perihal ketenagakerjaan. Maka penting bentuk pengawasan penerimaan tenaga kerja agar perusahaan lebih transparan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Ahmad Fawaz S.TP, saat berkunjung.

Dalam Perda ketenagakerjaan, salah satu isinya adalah mengatur bahwa investor yang membuka kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Cirebon harus bisa menyerap tenaga kerja lokal, minimal 60 persen.

Selain itu, kata Fawaz, sebagaimana diketahui, bahwa masih banyak permasalahan terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon seperti; UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) yang belum diterapkan oleh pengusaha, kemudian, pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan juga masih banyak ditemui di Kabupaten Cirebon. “Karena itu, kami ingin lebih mengetahui terkait pengelolaan tenaga kerja di PT Cipta Sinergi Asia ini,” jelasnya.

Menanggapi itu, HRD (*Human Resource Development*) PT CSA menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja di perusahaannya hampir 100% adalah karyawan lokal. Perusahaan ini mempekerjakan 40 orang karyawan, 2 manager dan personil security. Hanya 1 orang yang bukan tenaga lokal, yaitu *owner* sekaligus direktur dari PT CSA sendiri.



Sejak awal beroperasi pada awal tahun 2019, PT CSA telah memproduksi lampu LED, tepatnya perakitan lampu LED dengan bahan baku produk setengah jadi. Namun seiring datangnya pandemi Covid-19, hal itu berpengaruh kepada kinerja produksi lampu LED.

Akhirnya, kata HRD, untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), pimpinan perusahaan mencari solusi salah satunya dengan merubah produksi, dari semula perakitan lampu LED, berubah menjadi produksi pembuatan masker kesehatan.

“Untuk masker kesehatan sendiri, sampai sekarang masih belum melakukan produksi massal, baru melakukan *trial setting* mesin. Karena sampai saat ini, perizinan produksi masker juga sedang ditempuh,” tambahnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati S.Pd pun mempertanyakan perihal upah karyawan yang bekerja, maupun yang dirumahkan pasca perubahan produksi dari lampu LED ke masker kesehatan selama Covid-19 ini.

“Alhamdulillah, selama ini tidak ada pemutusan hubungan kerja. Kalau mengenai upah, kami sudah mengikuti peraturan yang berlaku dengan menerapkan UMK Kabupaten Cirebon,” jelas HRD PT Cipta Sinergi Asia tersebut.

Lanjutnya, HRD PT Cipta Sinergi Asia juga mengatakan pada awal pandemi Covid-19, perusahaan memang mengalami kesulitan produksi, sehingga setiap karyawannya diberlakukan sistem *shift*, sehari berangkat, sehari tidak, dengan menggunakan sistem gaji harian. “Namun mulai beberapa bulan

terakhir, kegiatan produksi sudah mulai normal dan karyawan diberikan gaji sesuai UMK kembali,” ujarnya.

Merespon pernyataan HRD PT CSA, Aan Setyawan, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menghimbau agar PT CSA juga berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Cirebon, terkait penerimaan tenaga kerja.

“Misalnya *skill* apa saja yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan, biar Disnakertrans yang akan menyediakan, sehingga nanti PT CSA juga bisa mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar terampil sesuai kebutuhan, karena Disnakertrans juga sudah melakukan pelatihan dalam menyiapkan tenaga kerja,” ungkapnya.

Nana Kencanawati juga mengatakan, selain untuk tetap berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Cirebon, ia meminta agar HRD PT Cipta Sinergi Asia, bisa masuk dalam Forum HRD di Kabupaten Cirebon untuk wadah *sharing* dan komunikasi.

Sedangkan dalam menjawab pertanyaan soal pengelolaan limbah, HRD PT CSA mengatakan limbah hasil pabriknya masih skala kecil dan batas wajar. Sejak awal berjalan sampai sekitar 1,5 tahun sekarang, limbah yang terkumpul tidak lebih dari setengah ton.

“Limbah itu berupa PCB lampu *reject* yang tidak bisa diklaim ke produsen. Memang untuk izin produksi masker sedang kita urus, mulai izin produksi, edar dan izin lingkungannya, kami merasa sangat dibantu dalam mengurus izin ini oleh Pemkab,” katanya. •fir/suf

H. Subhan: Politik Itu Luhur Maka Harus Jujur

Ia menganggap politik sebagai sarana menggapai maslahat, bukan sekedar menuntaskan syahwat.
Pantang baginya menusuk teman dari belakang.



Foto-foto: Maulana/CK

“Ittaqullah!” tegasnya saat ditanya mengenai prinsip utama hidup. Pemilik nama lengkap Drs. H. Subhan merupakan pribadi yang rendah hati. Terlihat dari caranya mengingatkan penulis agar jangan berlebihan

menuliskan profil tentang dirinya. Beberapa kisah inspiratif yang dipaparkannya patut menjadi teladan.

Selain itu, tujuan utama hidupnya adalah semata-mata untuk akhirat. Maka cara-cara

yang dilakukan pun berusaha untuk tidak bertentangan dengan prinsip Islam sebagai agamanya. “Saya di politik berusaha menghindari sebisa mungkin perilaku yang buruk. Bukan berarti saya terselamatkan, namun se-

bisa mungkin untuk terus memegang prinsip agama Islam,” jelasnya.

Pria kelahiran Cirebon, 15 Juni 1963 tersebut sangat percaya terhadap takdir yang Allah SWT gariskan dalam kehidupan. Semua hal yang ia dapatkan merupakan kuasa Allah SWT berikan untuk dirinya. “Saya percaya bahwa sebaik-baik rencana itu milik Allah SWT. Maka saya menjalani sesuai takdir. Terkesan Jabariah, tapi ya saya tetap ikhtiar karena kita kan Ahlussunnah Wal Jama’ah,” lanjutnya.

Wujud takdir yang ia imani adalah keberadaannya dalam dunia politik. Posisi yang sebenarnya tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, termasuk dua kali menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, selama 25 tahun merantau di Jakarta, dari zaman kuliah hingga memiliki empat orang putra tidak ada aktivitasnya yang berkaitan dengan kegiatan politik.

Ia menempuh Pendidikan sarjana di Universitas Indonesia (UI) dengan konsentrasi Sastra Indonesia. Aktivitas pasca kuliah lebih banyak berkuat pada dunia jurnalistik. “Saya orang media dari tahun 89. Pernah di *Warta Ekonomi*, *Berita Buana* terus *Republika*, terakhir ke *Gema Inساني Pers*,” jelasnya.

Ia mengenal politik praktis ketika banyak berinteraksi dengan orang-orang partai. Saat itu, ia banyak bersentuhan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tahun 2000 merupakan masa dimana ia memutuskan untuk kembali ke Cirebon setelah 25 tahun merantau di Jakarta. “Saya pulang kesini (Cirebon) tahun 2000. Sebelum pulang, saat di Jakarta saya sudah bergaul dengan teman-teman partai politik. Waktu itu



dengan PPP,” terangnya.

Saat ada pembentukan Partai Gerindra, ia ditunjuk menjadi ketua DPC Kabupaten Cirebon pertama hingga kini memasuki tahun ke 13. Di tangannya Partai Gerindra Kabupaten Cirebon memiliki grafik positif. “Saya hanya menjalankan amanah saja. Kalau orang bilang saya berprestasi mungkin iya, tapi tidak spektakuler. Saya membawa partai Gerindra itu dari 3 kursi, 6 kursi, dan sekarang 7 kursi,” ungkapnya.

Pandangannya mengenai politik tidak dimaknai secara pragmatis. Jika politik diartikan sebagai seni atau upaya untuk mendapatkan kekuasaan, maka harus bertujuan pada kebaikan.

“Politik itu kekuasaan, boleh begitu diterjemahkannya. Namun harus bertujuan untuk kebaikan. Jika tujuannya adalah kebaikan maka tidak ada pembenaran ketika melakukannya dengan keburukan,” jelasnya.

“Orang bilang di politik itu kepentingan. Nah tergantung kita memaknainya. Namanya kita hidup memiliki kepentingan. Tapi kepentingan yang bagaimana. Kadang orang sebelum mengartikan kepentingan itu sudah berpikir negatif dulu,” tegasnya.

Politik merupakan wasilah untuk kebaikan. Menjadikannya sebagai kendaraan untuk membantu banyak orang. Salah jika berpolitik dengan dusta, sebab



dusta adalah perbuatan dosa. “Saya di politik melakukan langkah sebagai politisi, tapi tetap tidak boleh melenceng dari ajaran Islam. Misalnya Islam melarang dusta, maka saya tidak mau berdusta. Satu kata dusta itu dosa. Dengan bungkus strategi lalu orang bisa berdusta,” ungkapnya.

Sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ia merupakan sosok yang dapat membaaur dengan semua warna. Meskipun tidak sedikit pihak yang menilai kurang pas tentang sikap politiknya “Saya tidak fanatik, saya ingin berbaur dengan siapapun. Dengan semua warna. PDIP, PKB, dan partai lainnya. Meskipun kadang banyak orang yang tidak paham dengan sikap politik saya,” jelasnya.

Di usia yang ke-57, ia masih tampak segar bugar dan energik. Tipsnya adalah rutin berolahraga, membaca Al Quran, dan berpikir positif. “Saya *hobby* berolahraga, seperti main bulu tangkis, tenis meja, dan lari. Setiap pagi selesai *nderes*, bersama istri

saya rutin lari pagi sejauh 4 KM. Dalam satu hari jangan sampai tinggal membaca Al Quran, meski satu ayat,” jelasnya.

Aktivitas olah raga baginya merupakan ikhtiar menggapai kesehatan dan *refreshing*. Selain rutin berlari pagi, satu minggu sekali terkadang lebih ia bermain bulu tangkis. “Dengan olah raga jasmani kita lebih bagus, menjaga kesehatan dan akan tercipta pikiran yang bagus. Dari kecil saya suka olah raga, karena saya orang kampung. Orang kampung itu dari kecil sudah suka olahraga dan mandinya di sungai,” ceritanya mengingat masa lalu.

Tidak heran jika seusianya masih sanggup bermain bulu tangkis hingga tiga set. Caranya menjaga kesehatan patut dicontoh. Ia mendapat karunia tubuh yang sehat dan awet muda “Alhamdulillah Allah menganugerahkan anatomi yang shoheh, sampai sekarang belum punya penyakit. Saya sudah 57 tahun, ngopi saya kuat. Kesukaan saya

kopi puntang *wine*,” terangnya.

Selain berolahraga, ia dikenal sebagai pribadi yang suka ngobrol dan humoris. Meskipun ia juga dikenal sering marah. “Saya itu suka ngobrol. Sampai anak saya ketika menuliskan biodata bapaknya, Nama Subhan, Hobi Ngobrol. Dan memang saya kalau ngobrol bisa sampai larut malam, tapi sebisa mungkin ngobrol tentang kebaikan dan agama,” jelasnya sambil tertawa mengingat tingkah puteranya.

“Saya orang nya suka humor, tapi saya juga orang nya suka marah terutama ketika melihat hal-hal yang kurang berkenan. Saya sulit menyimpan sesuatu. Jadi saya banyak salah nih. Maka saya sekarang sedang belajar mengendalikan diri setelah saya baca beberapa referensi. Kalau di partai sendiri dengan anggota sudah seperti bapak dengan anak-anak, jadi mereka tuh bilang “Bapak tuh nyewot bae,” lanjutnya sambil terawa kecil.

Ia membawa Partai Gerindra Kabupaten Cirebon menjadi partai yang solid dan terlepas dari hiruk pikuk. Baginya berpolitik tidak harus ngoyo. Melakukan semuanya sesuai kaidah, terutama dalam batas yang diajarkan agama. Ia pun mencoba membantah mitos, bahwa dalam politik tidak boleh membawa keluarga.

“Tiap minggu saya jalan-jalan dengan teman-teman Gerindra. Kadang ke rumah siapa, ke Losari atau kalau mau ngadem di Linggarjati Kuningan, untuk menjaga solidaritas. Kita membawa keluarga. Saya ingin mematahkan mitos bahwa di politik itu tidak boleh membawa keluarga. Salah itu! Karena laki-lakinya bisa binal, perempuannya bisa *nusyuz* (meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya, red),” pungkasnya. •Mol

Optimisme Rotan Cirebon Menguasai Pasar Dunia

Derasnya gempuran produk import, terutama dari negeri tirai bambu, tidak membuat kerajinan rotan Cirebon tenggelam. Seperti apakah upaya pengusaha rotan dalam memenangkan persaingan global?



Foto: Maulana/KR

Dengkuran mesin-mesin pabrik saling sahut, tampak pula para pekerja sedang menganyam rotan dengan cekatan. Satu persatu kerajinan rotan unik dan menarik dihasilkan. Mereka bukan sekadar karyawan pabrik biasa, namun pengrajin yang menghasilkan karya berkualitas. Produk mereka menjangkau hingga mancanegara.

Tidak tercatat pasti kapan awal mula kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon muncul. Namun dari penuturan beberapa tokoh, tahun 70-an produk kerajinan rotan sudah ramai. Jika Tahun 2000-an merupakan generasi ke empat, maka kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon diprediksi telah ada sejak lama. “Tahun 70-an saat saya kecil rotan itu sudah ramai,” terang Izzudin salah seo-

rang tokoh.

“Pengusaha rotan di Kabupaten Cirebon ini ada empat generasi. Tahun 2000-an merupakan generasi ke empat. Kelompok pengrajin rotan ada yang lokal, ekspor, dan ekspor juga lokal. Dulu ada pengusaha rotan sekaligus tokoh yaitu H. Sunoto dan H. Kalim namanya,” lanjutnya.

Sebelum rotan ramai seperti



saat ini, dahulu rotan di Kabupaten Cirebon diproduksi dan dijual secara mandiri. Mereka menjual hasil kerajinan rotan dengan dipikul dari kampung ke kampung. Ada pula yang sengaja merantau ke Jakarta untuk berjualan rotan dari Cirebon. Seperti yang dilakukan oleh H. Amsor.

H. Amsor adalah salah seorang pengusaha rotan yang sukses. Pengusaha asal Desa Bode-

sari ini mengawali usahanya dari menjadi pedagang rotan keliling di Jakarta. "Rotan itu awalnya dijual dengan dipikul keliling dari kampung ke kampung. Itu yang dulu orang tua saya lakukan. Saya juga jualan rotan tapi di Jakarta," ujar H. Amsor bercerita.

Ia mengawali usaha dengan modal pribadi yang tidak seberapa. Sebab ia hanya membawa produk dari pengrajin dan bayar ketika sudah terjual. Baginya,

modal terbesar bukan dari uang yang banyak, namun kemauan bekerja dan berdagang. "Modal uang sih tidak seberapa, karena ambil dari pengrajin dulu terus bayar kalau sudah laku. Yang penting punya modal kemauan bekerja dan berdagang," ungkapnya.

Nasib mujur datang saat ia mendapat konsumen dari Belanda. Dari situ ia mengembangkan usahanya menjadi lebih besar hingga memiliki pabrik sendiri. "Saat di Jakarta saya bertemu dengan pembeli dari Belanda, kemudian mencoba mengembangkan usaha dengan mengeksport rotan. Alhamdulillah hingga saat ini punya pabrik rotan sendiri, CV Bodesari Rotan namanya," jelasnya.

Sebagai putra daerah yang lahir pada tanggal 24 Desember 1953, ia berhasil memberdayakan masyarakat sekitar. Mereka diberdayakan menjadi karyawan pabrik di perusahaan miliknya. Ada juga yang secara mandiri (*home industry*) kemudian hasil produksinya ia tampung untuk dijual. "Jumlah karyawan kita kurang lebih 400 orang, kebanyakan dari masyarakat sekitar," ungkapnya.

Selain H. Amsor, masih banyak lagi pengusaha rotan dari yang kecil hingga besar. Banyaknya pengrajin rotan menjadikan produktivitas karya rotan di Kabupaten Cirebon diakui hingga mancanegara. Globalisasi di bidang ekonomi yang ditandai dengan adanya pasar bebas turut serta dalam meluaskan area pemasaran rotan Cirebon.

Jika pasar bebas bagi banyak pengusaha di Indonesia merupakan momok, namun tidak bagi pengusaha rotan di Kabupaten Cirebon. Pasar bebas justru menjadi lahan untuk mengek-



spansi produk kerajinan rotan ke berbagai negara. "Pemasaran kita ke Belanda, Jerman, Afrika Utara, Australia, dan lain-lain," jelasnya.

Pesatnya perkembangan rotan saat ini bukan berarti tanpa masalah. Sekitar tahun 2005 rotan mengalami penurunan, bahkan tidak sedikit pengusaha dan pengrajin yang gulung tikar. Hal itu disebabkan oleh adanya ekspor bahan mentah rotan, termasuk ke China. Hingga banyak pengrajin yang kesulitan mendapatkan bahan baku.

"Rotan kita pernah anjlok saat bahan bakunya di ekspor. Sehingga kita kesulitan mendapat bahan untuk produksi bahkan beberapa teman saya bangkrut. Dari situ juga China mulai memproduksi rotan dan bersaing dengan kita. Kondisi membaik saat ada kebijakan melarang ekspor bahan mentah, sehingga membangkitkan kembali produksi lokal," ceritanya.

Meski dalam pasar bebas ber-

saing dengan China, namun dengan sikap optimisme dan produk yang berkualitas rotan lokal mampu unggul. "China itu mampu memproduksi dengan cepat dan harganya lebih murah. Kita sempat mengalami penurunan konsumen dari negara lain. Namun karena kita memiliki kualitas produk yang lebih kuat dan lebih rapih, akhirnya konsumen kembali ke kita," jelasnya.

"Kunci bersaing dengan china adalah menjaga kualitas. Kalau di China, saat pembeli datang mensurvey mereka tidak mau di-*complain* dan terkesan keras kepala. Sementara kita memproduksi dengan kualitas yang diharapkan konsumen. Jadi jika ada konsumen yang merasa tidak puas dengan produk kita, maka akan kita *service* sesuai permintaan," lanjutnya.

Bahan baku rotan di Kabupaten Cirebon banyak di datangkan dari Sulawesi, Kalimantan, dan Lampung. Meski berbahan dasar rotan yang sama, namun

hasil akhir sebuah produk kerajinan rotan memiliki perbedaan. "Uniknya rotan disini belum tentu ada di daerah lain, sebab hasil kerajinan mengayamnya mungkin berbeda," ujar istri H. Amsor.

Marketing dilakukan melalui internet dan jejaring. Selain itu, para pengusaha rotan mengunjungi negara lain untuk membaca peluang ekspor. Tidak sedikit pula konsumen dari luar negeri datang ke toko atau pabrik untuk melihat langsung proses produksinya.

Selain ekspor, geliat kerajinan rotan juga diminati oleh konsumen lokal. Bahkan saat ini konsumen dapat memilih variasi bahan produk. Ada produk yang berasal dari bahan rotan asli, adapula dari bahan sintesis. "Lokalan juga ikut ramai. Kita kirim ke Banyuwangi sampai ke luar Jawa hingga Medan dan Padang. Kirim ke Lampung hampir tiap dua hari sekali satu truk atau sekitar 96 set," lanjutnya.

Pesatnya usaha rotan H. Amsor ditandai dengan omset yang ia peroleh. Dalam satu bulan ia mampu meraup omset hingga Rp 4 miliar. "Kita ekspor dan kirim ke luar Jawa dalam seminggu sebanyak empat sampai lima kontainer dengan nilai lima ratus juta hingga satu miliar. Jadi omset dalam sebulan kira-kira dua hingga empat miliar," jelas H. Amsor.

Agar produk rotan dapat diterima pasar dan mampu bersaing, hal yang harus dilakukan adalah menjaga kepuasan konsumen. "Saya berpesan untuk menjaga kualitas produk agar konsumen puas dan bertahan. Juga menjaga kepercayaan konsumen. Selain itu harus berhati-hati karena selalu ada peluang orang yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya. •Mol

Kerajinan Ban Bekas

Ramah Lingkungan, Hasil Menguntungkan

Ia hanya lulusan SMK dan sulit mendapat pekerjaan. Dengan kerajinan ban bekas, ia berniat mengurangi pengangguran.



Foto: foto: Maulana / KX

Inspirasi dan kreativitas dapat muncul dari kepekaan seseorang terhadap lingkungan sekitar. Mampu melihat persoalan dengan cara pandang berbeda dapat menghasilkan nilai-nilai positif. Seperti yang dilakukan oleh Akbar Haryono, seorang pengrajin ban bekas dari desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

Di usianya yang tergolong muda, ia mampu berinovasi melalui ban bekas yang bagi kebanyakan orang adalah sampah. Akbar adalah salah satu pengrajin dari sekitar 10 pengrajin yang ada di Desa Kasugengan Lor. "Saya melihat banyak ban bekas

yang tidak digunakan, lantas saya mencoba menggali potensi apa yang bisa dikembangkan, dan jadilah saya membuat kerajinan yang menarik bagi masyarakat," jelas Akbar.

"Limbah ban bekas itu saya bentuk menjadi beberapa kerajinan dan produk, seperti pot bunga, tempat sampah, dan kanvas ban mobil. Dulu pernah juga kakak saya bikin kursi, tapi sekarang kursi tidak terlalu prospek. Orang tua saya juga pengrajin, tapi pengrajin mainan bukan ban. Mungkin itu juga yang membuat saya tertarik pada kerajinan," lanjutnya.

Akbar memulai usaha keraji-

nan ban bekas sejak lulus SMK, tahun 2016. "Setelah lulus SMK saya memulai membuka usaha kerajinan ban bekas. Karena memiliki pengalaman semasa sekolah dulu pernah sambil bekerja di kerajinan ban bekas, kemudian saya belajar otodidak dan terkadang melihat di *youtube*," terang Akbar.

Bahan yang digunakan dalam kerajinan merupakan ban bekas yang sudah tidak dapat divulkanisir. Sebab ada ban bekas yang di dapat dari pengepul masih bisa divulkanisir. Sehingga masih bisa dijual dalam bentuk ban utuh. Sementara ban bekas dengan kondisi tidak dapat di-



vulkanisir biasanya akan dibuang, dan inilah yang dimanfaatkan untuk kerajinan.

Ban bekas didapatkan dari pengepul dengan harga bervariasi tergantung jenis dan ukuran ban. "Ban kita beli ke pengepul, sebetulnya lebih murah kalau ambil sendiri ke bengkel-bengkel. Tapi waktunya tidak cukup. Saya beli dari pengepul dari harga Rp 2.000 sampai 30.000 tergantung jenis dan ukuran ban, misalnya ban bekas mobil truk saya beli Rp 15.000," jelas Akbar.

Usaha kerajinan ban bekas dapat berjalan meski dengan dana terbatas. "Modalnya sih cukup 1 sampai 2 juta untuk beli ban bekas. Paling harus siap dengan tempat, karena kita kan bu-

tuh penyimpanan ban dan proses produksinya. Modal paling mahal sebenarnya adalah *skill*, sebab tidak semua orang bisa dan itu juga menjadi kendala dalam usaha ini" jelasnya.

Meski dengan modal terbatas, namun kerajinan ban bekas ini mampu menghasilkan rupiah yang lumayan. Dalam satu minggu, Akbar mampu mendapat Rp 2.000.000 sehingga dalam satu bulan rata-rata pendapatan kotornya mencapai Rp 8.000.000.

"Harga produknya berbeda-beda, kita kan punya tiga produk. Ada kanvas ban mobil, tempat sampah, dan pot bunga. Harga pot dan tempat sampah dari Rp 20.000 hingga Rp 70.000, sementara kanvas dari harga Rp 10.000 hingga Rp 100.000," jelasnya.

Hal baik lain dari adanya kerajinan ban bekas ini tentu pada daya serap pekerja. Kegiatan produksi kerajinan ban bekas ini mampu menyerap tenaga kerja, terutama masyarakat sekitar termasuk adik Akbar yang putus sekolah. Akbar kini mempekerjakan 5 orang pengrajin. Ia membayar dengan sistem borongan, sekitar Rp 100 – 150 ribu sehari.

Akbar memiliki harapan besar, ia ingin mengembangkan usahanya agar mampu membuka lapangan kerja dan mengentaskan pengangguran. "Saya lulusan SMK dan sulit mendapat pekerjaan, sementara yang menganggur seperti saya juga banyak. Saya berharap dapat mengentaskan pengangguran melalui usaha ini," ujarnya.

Pola pemasaran yang ia jalankan masih konvensional, hasil kerajinan diambil dan dipasarkan orang lain. Jika ia sempat kadang keliling dari kampung ke kampung. "Kendalanya di pemasaran, saya sendiri merasa tidak banyak waktu karena ikut produksi. Paling baru mulai lewat media sosial, itupun masih belum maksimal," ungkapnya.

Pot bunga buatan Akbar banyak yang meminati. Bahkan, pelanggan bisa memesan sesuai model yang diinginkan. Dengan kreativitas dan inovasi dari jiwa muda yang dimiliki Akbar, ia bisa mewujudkan keinginan konsumen. Ia juga mampu menyajikan produk-produk kerajinan kekinian dan bersaing dengan produk lainnya.

"Kalau pot dari ban bekas ini lebih awet dan tidak mudah pecah, kemudian yang paling penting adalah mengurangi limbah. Karena konsep kita mendaur ulang, sehingga lebih ramah lingkungan," pungkasnya. •Mol

Mohamad Luthfi



Merdeka

Di sela blusukan, sore itu, seorang penjual bendera merah putih lewat. Saya membelinya dua helai. Tampak, wajah Pak Tua itu berbinar. Mungkin karena ada pembeli, jadi dia senang. “Bagaimana Pak jualannya, rame?” tanyaku spontan. “Nah itu Pak, ini penglaris. Dari pagi, baru Bapak yang beli. Merah putih sudah merdeka berkibar, tapi kita belum merdeka dari corona Pak, jualan sepi.” Jelasnya.

Selain bendera merah putih, tiap Agustus, kita memang kerap melihat atau mendengar kata ‘merdeka’. Tiap Agustus pula, orang selalu bertanya: sudahkah kita merdeka? Berbagai analisis dan perspektif pun bermunculan. Begitu seterusnya setiap tahun.

Merdeka dari sisi bahasa berarti bebas; tidak terke- na atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; dan leluasa.

Nah, dari definisi itu, bagaimana dengan kemerdekaan berbangsa atau bernegara saat ini? Juga beragam, banyak pendapat. Tapi, biasanya mengerucut pada dua pendapat besar.

Pertama, bilang sudah merdeka. Secara *de jure* begitu. Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menga- kuinya. Namun, pendapat kedua mengatakan se- cara *de facto* belum merdeka, masih dijajah oleh ka- pitalisme global.

Bak jamur di musim hujan, biasanya perde- batan itu ramai di Agustus, lalu hilang begitu saja. Jadi, bukan hanya lomba panjat pinang dan balap karung, diskusi pun ternyata mengenal musim.

Namun demikian, ada perdebatan soal ‘merdeka’ yang tak kenal musim. Dari zaman tabi’in hingga se- karang masih terus berlangsung. Berbuku-buku su- dah diterbitkan dari hasil kajian dan diskusi soal itu.

Pertanyaan dasarnya sama: Manusia itu haki- katnya merdeka dan bebas berkehendak, atau sep- erti wayang, sudah ditentukan lakonnya oleh sang dalang (Tuhan)?

Ada tiga kubu yang lahir dari pertanyaan itu.

Pertama, qadariyah, yang meyakini bahwa manusia bebas berkehendak. Kedua, jabariyah, yang meyaki- ni bahwa alur kehidupan manusia adalah ketentuan Tuhan. Ketiga, asy’ariyah, ini aliran penengah, yang mengatakan bahwa kehendak manusia dan Tuhan memiliki porsi masing-masing.

Biarlah itu menjadi kajian. Terlepas dari itu semua, saya lebih tertarik membahas pernyata- an penjual bendera di atas. Ucapannya sederhana: “kita belum merdeka dari corona,” tapi menyirat- kan banyak hal.

Corona telah membatasi manusia yang mengaku merdeka. Bahkan, hal-hal yang diperintahkan aga- ma dan negara saat sebelum pandemi, kini malah dilarang atau dibatasi. Ini menyadarkan anggapan selama ini bahwa “kalau mau bebas silakan di hutan saja.” Nyatanya setelah sampai di hutan pun, ia tak bisa leluasa keluyuran. Banyak binatang buas yang setiap saat menyeragnya.

Dengan Covid-19, tak perlu ke hutan untuk membuktikan betapa lemahnya manusia yang meng- aku merdeka itu. Melawan corona bahkan lebih merepotkan, karena wujudnya kasat mata. Keter- batasan akibat corona pun berdampak sistemik. Karena gerak kita terbatas, dampaknya bisa mem- batasi kegiatan ekonomi orang lain.

Jadi, kemerdekaan itu dibatasi oleh daya dan kemampuan yang manusia miliki itu sendiri. Yang kedua, kemerdekaan seseorang itu dibatasi oleh ma- nusia lain. Dan terakhir, kemerdekaan manusia itu dibatasi oleh ekosistem dan makhluk lainnya.

Karena ketiga hal itulah dalam kehidupan ber- masyarakat dan bernegara dibuat aturan. Tujuann- ya tentu saja agar kebebasan manusia tidak saling mengganggu kebebasan manusia lain, makhluk lain, dan ekosistem.

Untuk itulah kemerdekaan yang sesungguhnya adalah mentaati aturan, norma, dan hukum yang ada, baik hukum alam, adat, sosial, negara, maupun agama. Masih mau merdeka, Sob? Taati saja aturan.



SEKRETARIAT DPRD DAN SELURUH PEGAWAI



Ikin Asikin, S.Sos., M.Si.
Sekretaris DPRD Kab. Cirebon



Wawan Siswandar, SE., M.Si.
(PIT) Kabag Umum DPRD Kab. Cirebon /
Kabag Kesangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
Kabag Persidangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. H. Sucipto, MM.
Kabag Perundang-undangan DPRD Kab. Cirebon

Dirgahayu 75 Republik Indonesia 17 Agustus 2020





**PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**



H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

75
Tahun

DIRGAHAYU
★ REPUBLIK ★
INDONESIA
17 AGUSTUS